

DS:5669-3586-3212-2651

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099077/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01
Tanggal : 22 Februari 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
- 3. Provinsi : (29) BANTEN
- 4. Kode/Nama Satker : (099077) PENGADILAN NEGERI TANGERANG
- Sebesar : Rp. 564.820.000 (LIMA RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 564.820.000
Rp. 564.820.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 564.820.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP | | | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN TANGERANG (127) Rp. 564.820.000

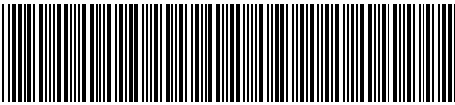
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099077/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:5669-3586-3212-2651

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (099077) PENGADILAN NEGERI TANGERANG

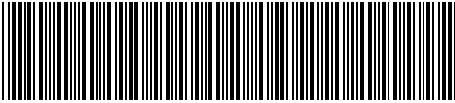
Halaman : I A. 1

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				564.820.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				564.820.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	1049.AEA	Koordinasi	2,00	kegiatan	1.500.000
Rincian Output	:	01	AEA.001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	2.00	kegiatan	1.500.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	1.751,00	Perkara, Berkas Perkara	495.000.000
Rincian Output	:	01	BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	1751.00	Perkara	495.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	462,00	Orang	64.000.000
Rincian Output	:	01	QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	462.00	Orang	64.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	12,00	Perkara, Berkas Perkara	4.320.000
Rincian Output	:	01	QCA.001	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (PN)	12.00	Perkara	4.320.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099077/2025
I B. SUMBER DANA



DS:5669-3586-3212-2651

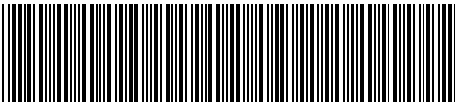
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (099077) PENGADILAN NEGERI TANGERANG

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	564.820.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	564.820.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099077/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



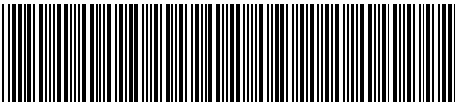
DS:5669-3586-3212-2651

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (099077) PENGADILAN NEGERI TANGERANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099077	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	-	564.820	-	-	-	564.820	29 . 51	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	564.820	-	-	-	564.820		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	564.820	-	-	-	564.820		
1049.AEA	Koordinasi	-	1.500	-	-	-	1.500		
	(29.51 BANTEN / KOTA TANGERANG)								
01	RM	-	1.500	-	-	-	1.500		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	-	495.000	-	-	-	495.000		
	(29.51 BANTEN / KOTA TANGERANG)								
01	RM	-	495.000	-	-	-	495.000	127@	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	-	64.000	-	-	-	64.000	29 . 51	
	(29.51 BANTEN / KOTA TANGERANG)								
01	RM	-	64.000	-	-	-	64.000	127	
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	-	4.320	-	-	-	4.320	29 . 51	
	(29.51 BANTEN / KOTA TANGERANG)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099077/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5669-3586-3212-2651

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (099077) PENGADILAN NEGERI TANGERANG
Kewenangan : (KD)

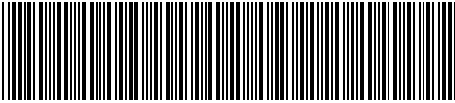
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
01 RM		-	4.320	-	-	-	4.320	127	
JUMLAH		-	564.820	-	-	-	564.820		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099077/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:5669-3586-3212-2651

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (099077) PENGADILAN NEGERI TANGERANG

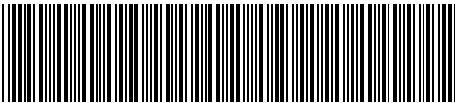
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099077 005.03.BF.1049	PENGADILAN NEGERI TANGERANG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	33.357	39.232	37.732	39.232	37.732	39.232	37.732	41.232	40.982	90.882	59.908	67.567	564.820
		BELANJA BARANG	33.357	39.232	37.732	39.232	37.732	39.232	37.732	41.232	40.982	90.882	59.908	67.567	564.820
		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	33.357	39.232	37.732	39.232	37.732	39.232	37.732	41.232	40.982	90.882	59.908	67.567	564.820
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	33.357	39.232	37.732	39.232	37.732	39.232	37.732	41.232	40.982	90.882	59.908	67.567	564.820
		PERKIRAAN PENERIMAAN	15.147	15.147	15.147	15.147	15.147	15.147	15.147	15.147	15.147	15.147	15.147	15.170	181.787
		- PNBP (425231)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	26	290
		- PNBP (425232)	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	745	8.830
		- PNBP (425233)	6.436	6.436	6.436	6.436	6.436	6.436	6.436	6.436	6.436	6.436	6.436	6.444	77.240
		- PNBP (425239)	7.952	7.952	7.952	7.952	7.952	7.952	7.952	7.952	7.952	7.952	7.952	7.955	95.427

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099077/2025
IV A. B L O K I R



DS:5669-3586-3212-2651

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [099077] PENGADILAN NEGERI TANGERANG

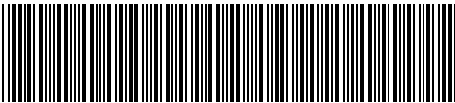
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
099077	PENGADILAN NEGERI TANGERANG Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 226.378 52 Belanja Barang Rp. 226.378		
005.03.BF 1049	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
1049.AEA	Koordinasi 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 750 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 103.628 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099077/2025
IV B. C A T A T A N



DS:5669-3586-3212-2651

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [099077] PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002